



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Bab I Pendahuluan.....	I-1
I.1 Maksud dan Tujuan.....	I-2
I.2 Landasan Hukum.....	I-3
I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan PD.....	I-3
I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	I-3
I.3 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	II-1
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	III-1
BAB IV Penutup.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja atau pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Dengan adanya perubahan terhadap kebijakan pembangunan pada tahun berjalan meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan penyusunan perubahan renja tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi.

Perubahan renja yang disusun dengan mengacu pada perubahan RKPD ini memuat evaluasi hasil tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun berjalan, perubahan asumsi dalam penyusunan Perubahan APBD serta memuat perubahan rencana program dan kegiatan. Perubahan rencana program kegiatan PD antara lain memuat:

- a. Pergeseran Kegiatan
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja baru
- c. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan

Proses penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua stakeholder dalam kapasitas untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

I.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan renja tahun anggaran 2025 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana kerja Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun)
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana kerja Perangkat Daerah
3. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam melaksanakan program/kegiatan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan dan sasaran strategis selama tahun 2025

Tujuan penyusunan perubahan renja tahun anggaran 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

I.2 Landasan Hukum

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3)
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4)
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82)
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 46)
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53)

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi dalam membuat perencanaan antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Saran tindak Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan yang memayungi dalam membuat anggaran antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

I.3 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2025 dan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan perubahan renja 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang pembuatan perubahan renja, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja, landasan hukum dan sistematika penulisannya.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini berisi mengenai evaluasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sampai dengan triwulan II.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga sasaran yaitu meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, meningkatnya pemanfaatan publik terhadap saluran komunikasi informasi dan terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi memiliki 5 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda :

Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda ini dilaksanakan dengan target jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda sebanyak 12 laporan, output dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 3 laporan.
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE :

Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE ini dilaksanakan dengan output jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

sebanyak 12 dokumen. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana sebanyak 3 dokumen.

- c. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi :

Sub kegiatan koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi ini dilaksanakan dengan output jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan/atau portal data nasional sebanyak 7 layanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 7 layanan dan akan dilaksanakan rutin setiap bulan.

- d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota :

Sub kegiatan penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota ini dilaksanakan dengan output jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota sebanyak 58 Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 58 Perangkat Daerah dan akan dilaksanakan rutin setiap bulan.

- e. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah :

Sub kegiatan penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah ini dilaksanakan dengan output jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional sebanyak 12 dokumen. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana sebanyak 3 dokumen.

2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pada tahun 2025, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota ini dilaksanakan dengan output jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi sebanyak 13 Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 5 Perangkat Daerah.

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan dengan output jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi sebanyak 58 perangkat daerah. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan telah terlaksana 58 perangkat daerah.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik ini dilaksanakan dengan output jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis sebanyak 34 media. Sampai dengan

triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana sebanyak 30 media.

b. Pelayanan Informasi Publik

Sub kegiatan pelayanan informasi publik ini dilaksanakan dengan output jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan sebanyak 36 permohonan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 21 permohonan.

c. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub kegiatan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat ini dilaksanakan dengan output jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo sebanyak 68 komunitas. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 13 komunitas.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada tahun 2025, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Sub kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia ini dilaksanakan dengan output jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata sebanyak 12 dokumen. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 2 dokumen.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN ini dilaksanakan dengan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 56 orang/bulan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 55 orang/bulan.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini dilaksanakan dengan output jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 4 paket. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana setiap bulan dengan ketersediaan sebanyak 4 paket, dan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ini dilaksanakan dengan output jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 90 unit. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kegiatan ini telah terlaksana 9 unit.

Selain melaksanakan 5 program diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi Dan Informatika sampai dengan triwulan I tahun 2025 :

Tabel II. 1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																							
2.16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																						
2.16.0 1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18,550,501		16,278,761		19,513,000		3,630,224		-		-		-		3,630,224		3,630,224		19,57%
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan [551]	89.58 %		93.36 %		89.57 %		96.64 %		-		-		-		96.64 %		96.64 %		107.88 %	
2.16.0 1.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,330,201				16,951,182		3,350,673		-		-		-		3,350,673		3,350,673		21.86%
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [870]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
2.16.0 1.2.02 .0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1222]			15,330,201				16,951,182		3,350,673		-		-		-		3,350,673		3,350,673		21,86%
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	37 Orang /bulan		55 Orang /bulan		56 Orang /bulan		55 Orang /bulan		-		-		-		55 Orang /bulan		55 Orang /bulan		148.65 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Tunjangan ASN [4724]																						
2.16.0 1.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,996,579				1,674,171		267,435		-		-		-			267,435		267,435		13.39%	
							Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [872]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %			100.00%		
2.16.0 1.2.06 .0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1223]			1,996,579				1.674.171		267.435		-		-		-			267.435		267.435		13,39%	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4725]	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		-		-		-		4 Paket		4 Paket			100.00%		
2.16.0 1.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,223,721				887,647		12,117		-		-		-			12,117		12,117		0.99%	
							Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [873]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %			100.00%		
2.16.0 1.2.09 .0006						Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya [1224]			1,223,721				887.647		12.117		-		-		-			12.117		12.117		0,99%	
							Jumlah Peralatan dan Mesin	90 Unit		90 Unit		90 Unit		9 Unit		-		-		-		9 Unit		9 Unit			10.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							Lainnya yang Dipelihara [4726]																					
2.16.0 2						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			16,438,816		13,643,345		18,471,049		1,494,063		-		-		-			1,494,063		1,494,063		9,09%
						Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam [546]		89 %		99,97 %		88 %		100,00 %		-		-		-			100,00 %		100,00 %		112,36 %	
2.16.0 2.2.01						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16,438,816				18,471,049		1,494,063		-		-		-			1,494,063		1,494,063		9,09%
						Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja [1265]		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-			100 %		100 %		100,00 %	
						Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan [875]		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		-		-		-			4 Jenis		4 Jenis		100,00 %	
2.16.0 2.2.01 .0015						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat [1218]			2,943,703				1,659,559		193,926		-		-		-			193,926		193,926		6,59%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo [4721]	68 Komunitas		12 Dokumen		68 Komunitas		13 Komunitas		-		-		-		13 Komunitas		13 Komunitas		19.12 %			
2.16.0 2.2.01 .0017						Pelayanan Informasi Publik [1214]			849,870				2.001.839		42.833		-		-		-		42.833		42.833		5,04%		
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan [4720]	36 Permohonan		12 Dokumen		36 Permohonan		21 Permohonan		-		-		-		21 Permohonan		21 Permohonan		58.33 %			
2.16.0 2.2.01 .0021						Pengelolaan Media Komunikasi Publik [1219]			12,645,244				14.809.651		1.257.304		-		-		-		1.257.304		1.257.304		9,94%		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis [4722]	34 Media		12 Dokumen		34 Media		30 Media		-		-		-		30 Media		30 Media		88.24 %			
2.16.0 3						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			74,293,471		59,843,599		83,478,406		1,358,815		-		-		-		1,358,815		1,358,815		1,83%		
							Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. [543]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2.16.0 3.2.02					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		74,293,471				83,478,406		1,358,815		-		-		-			1,358,815		1,358,815		1.83%		
						Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam [1266]	100 %		100 %		100 %	100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%				
						Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam [2311]	100 %		N/A		100 %	100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%				
						Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring [1271]	100 %		100 %		100 %	100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%				
2.16.0 3.2.02 .0015					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda [1206]		498,811				370.879		61.033		-		-		-			61.033		61.033		12,24%		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda [4714]	12 Laporan		58 Dokumen		12 Laporan	3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2.16.0 3.2.02 .0028						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE [1202]		31,760,170				2.458.129		435.629		-		-		-		435.629		435.629			1,37%		
						Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE [4713]	58 Dokumen		58 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen			5.17%			
2.16.0 3.2.02 .0025						Koordinasi pemanfaatn Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi [1209]		5,046,132				826.774		144.037		-		-		-		144.037		144.037			2,85%		
						Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional [4715]	7 Layana n		190 Unit		7 Layan an		7 Layana n		-		-		-		7 Layana n		7 Layana n			100.00%			
2.16.0 3.2.02 .0024						Penyelenggaran Jaringan Intra Pemerintah		31,347,122				70.258.841		607.280		-		-		-		607.280		607.280			1,94%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Daerah Kab/Kota [5213]																							
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota [8213]	58 Perangk at Daerah		N/A		58 Peran gkat Daera h		58 Perang kat Daerah		-		-		-		58 Perang kat Daerah		58 Perang kat Daerah		100.0 0%				
2.16.0 3.2.02 .0016						Penyelengg aaran pusat kendali Pemerintah Daerah [1210]		5,641,2 36				9.563.78 3	110.83 7		-		-		-		110.837		110.837		1,96%				
						Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional [4716]	12 Dokume n		2 Unit		12 Doku men		3 Dokum en		-		-		-		3 Dokum en		3 Dokum en		25.00 %				
2.20						Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																							
2.20.0 2						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		695,275		375,169		518,547	46,933		-		-		-		46,933		46,933		6,75%				
						Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi [1406]	100 %		100.0 0 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.0 0%				
2.20.0 2.2.01						Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		695,275				518,547	46,933		-		-		-		46,933		46,933		6.75%				
						Jumlah sektor yang dianalisa [880]	5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		-		-		-		5 Sektor		5 Sektor		100.0 0%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2.20.0 2.2.01 .0010						Penyeleng araan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia [1220]			695,275			518.547		46.933		-		-		-		46.933		46.933		6,75%			
						Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata [4723]	12 Dokume n			12 Doku men		12 Doku men	2 Dokum en		-		-		-		2 Dokum en		2 Dokum en		16.67 %				
2.21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																										
2.21.0 2						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			7,177,846		4,774,768		11,786,640		356,918		-		-		-		356,918		356,918		4,97%		
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [1031]	41 %			27.59 %		34 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%			
2.21.0 2.2.01						Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4,474,291			5,909,530		107,392		-		-		-		107,392		107,392		2.40%			
						Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika [1268]	3 kali/per hari			3 kali/pe r hari		3 kali/pe r hari	3.1 kali/per hari		-		-		-		3.1 kali/per hari		3.1 kali/per hari		103.3 3%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2.21.0 2.2.01 .0004						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota [1213]			4,474,291				5.909.530		107.392		-		-		-			107.392		107.392		2,40%	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi [4719]		13 Perangkat at Daerah		16 Peran gkat Daera h		13 Peran gkat Daera h		5 Perang kat Daerah		-		-		-		5 Perang kat Daerah		5 Perang kat Daerah			38.46 %		
2.21.0 2.2.02						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2,703,556				5,877,110		249,525		-		-		-			249,525		249,525		9.23%	
						Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan [1269]		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		-		-		-		6 Kali		6 Kali			100.00%		
2.21.0 2.2.02 .0001						Operasional isasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [1212]			2,703,556				5,877,110		249,525		-		-		-			249,525		249,525		9,23%	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi [4718]		58 Perangkat at Daerah		58 Peran gkat Daera h		58 Peran gkat Daera h		58 Perang kat Daerah		-		-		-		58 Perang kat Daerah		58 Perang kat Daerah			100.00%		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perkembangan keadaan, antara lain yaitu pergeseran pagu kegiatan antar kegiatan, dan penambahan atau pengurangan target kinerja atau pagu kegiatan. Sedangkan untuk lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, tidak mengalami perubahan.

Program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tetap terfokus pada lokasi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari total semula anggaran murni belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 133.767.642.343,- mengalami penurunan menjadi Rp. 127.187.991.572,-

Tabel III. 1

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,57 %	19,513,000,200	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,57 %	20,283,926,240	
	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,951,182,283	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	17,808,355,902	
	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	16,951,182,283	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	17,808,355,902	
	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	1,674,171,200	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	1,705,195,016	
	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,674,171,200	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,705,195,016	
	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	887,646,717	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	770,375,322	
	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	887,646,717	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	770,375,322	
2	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase kecepatan respon/	88 %	18,471,048,745	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase kecepatan respon/	88 %	21,885,763,228	

	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam			INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam			
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	18,471,048,745	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	21,885,763,228	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100 %				Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100 %		
	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,659,558,686	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,875,180,860	
	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	2,001,839,018	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	2,016,694,652	
	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	14,809,651,041	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	17,993,887,716	
3	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan	100 %	83,478,406,149	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan	100 %	73,040,572,148	

			SPBE yang telah ditangani.					SPBE yang telah ditangani.			
	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100 %	83,478,406,149	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100 %	73,040,572,148	
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100 %				Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100 %		
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100 %				Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100 %		
	2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	370,878,712	2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	349,810,752	
	2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	9,563,782,846	2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	8,730,517,450	
	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah	70,258,841,214	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah	59,829,281,930	

		2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	826,773,959		2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	1,566,369,838	
		2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	2,458,129,418		2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	2,564,592,178	
4	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %	518,547,407		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %	534,981,114	
	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	518,547,407		2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	534,981,114	
		2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	518,547,407		2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	534,981,114	
5	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34 %	11,786,639,842		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34 %	11,442,748,842	
	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server	3 kali/per hari	5,909,529,676		2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server	3 kali/per hari	5,562,173,396	

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Komunikasi dan Informatika				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	5,909,529,676		2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	5,562,173,396	
		2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	5,877,110,166		2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	5,880,575,446	
		2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	5,877,110,166		2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	5,880,575,446	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas



Muhammad Fikser AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001